JURNAL PENDIDIKAN IPS
https://doi.org/10.37630/jpi.v16i5.5203
Vol.16 No.5, Tahun 2026 | ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141

Sinyal Kebijakan dan Paradoks Transparansi: Analisis Kebijakan Fiskal dan Komunikasi Publik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (2025–2026)

Isna Rufaida

Universitas Trisakti

*Correspondence: rufaida.isna@gmail.com

ABSTRAK

Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa pada 8 September 2025 menandai pergeseran dari kehati-hatian fiskal menuju kebijakan ekspansif pro-pertumbuhan yang disertai gaya komunikasi publik yang spontan dan terbuka. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kebijakan fiskal dan gaya komunikasi publik Purbaya selama masa jabatannya (8 September 2025–14 September 2026) membentuk sinyal kebijakan bagi pasar dan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif-deskriptif. Korpus berupa 36 dokumen sekunder (12 dokumen resmi pemerintah/KSSK, 6 transkrip komunikasi publik, dan 18 berita media ekonomi) dianalisis dengan analisis isi kualitatif dan kerangka *framing* Entman, kemudian ditriangulasi dengan hasil penelitian empiris terdahulu mengenai komunikasi Purbaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan tanpa filter, penertiban budaya Asal Bapak Senang (ABS), dan rotasi pejabat Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan legitimasi publik, tetapi sekaligus menghasilkan sinyal kebijakan yang tidak jernih (*noisy signaling*), yang tampak dari klarifikasi berulang oleh KSSK, Danantara, Dewan Ekonomi Nasional, dan Istana. Penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada bank Himbara, dimulai dari Rp200 triliun hingga pagu kumulatif Rp381 triliun, diikuti penguatan saham sektor perbankan sebesar 2,4–3,1% dan sentimen media sosial yang terpolarisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi yang autentik dapat memperkuat legitimasi, tetapi tanpa disiplin pesan dan koordinasi antarlembaga justru melemahkan kredibilitas fiskal. Temuan ini menegaskan perlunya protokol komunikasi fiskal yang memadukan keterbukaan dengan konsistensi sinyal.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal; Komunikasi Pemerintahan; Kredibilitas Fiskal; Paradoks Transparansi; Sinyal Kebijakan

This is an open access article under the CC - BY license.

PENDAHULUAN

Kementerian Keuangan memegang posisi sentral dalam perekonomian nasional sebagai pengelola kas negara, penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Posisi tersebut menuntut ketepatan dalam merumuskan kebijakan fiskal sekaligus kecermatan dalam mengomunikasikannya. Setiap pernyataan, gestur, dan keputusan Menteri Keuangan dibaca oleh pelaku pasar domestik, investor asing, lembaga pemeringkat, dan masyarakat luas sebagai penanda arah kebijakan makroekonomi (Blinder et al., 2008; Canel & Luoma-aho, 2019). Dalam konteks Indonesia, Kurniawan (2025) menegaskan bahwa komunikasi pejabat fiskal berfungsi sebagai jangkar ekspektasi pasar yang turut menentukan persepsi risiko investasi.

Literatur ekonomi kebijakan menempatkan komunikasi sebagai instrumen kebijakan itu sendiri. Blinder (1998) dan Woodford (2005) menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan makro sangat bergantung pada kemampuan otoritas mengelola ekspektasi, bukan semata pada besaran instrumen yang digunakan. Geraats (2002) membedakan berbagai dimensi transparansi otoritas ekonomi, mulai dari transparansi politik, ekonomi, prosedural, kebijakan, hingga operasional, sehingga keterbukaan tidak dapat dipahami sebagai konsep tunggal. Morris dan Shin (2002) bahkan memperlihatkan bahwa informasi publik yang tidak cukup presisi dapat menurunkan kesejahteraan karena pelaku ekonomi cenderung memberi bobot berlebih pada sinyal publik. Ketidakpastian kebijakan yang muncul dari komunikasi yang tidak terkoordinasi terbukti menahan investasi korporasi (Gulen & Ion, 2016), sedangkan tekanan politik terhadap otoritas ekonomi dapat menggerus kredibilitas kelembagaan (Binder, 2021). Pada era media sosial, ekspektasi publik juga terbentuk dan dapat

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v16i5.5203

diamati melalui percakapan daring (Angelico et al., 2022), sehingga ruang komunikasi pejabat fiskal tidak lagi terbatas pada saluran resmi.

Pelantikan Purbaya Yudhi Sadewa oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih pada 8 September 2025 menandai babak baru tata kelola fiskal Indonesia. Purbaya adalah teknokrat berlatar belakang Sarjana Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung serta M.Sc. dan Ph.D. Ilmu Ekonomi dari Purdue University, dengan disertasi mengenai pengaruh nilai tukar terhadap investasi asing langsung (Sadewa, 2000). Sebelum menjabat, ia memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan berkarier di Kemenko Marves (DDTC News, 2025; Kementerian Keuangan RI, 2025; Pajakku, 2025). Rekam jejak di LPS, termasuk upaya menjaga suku bunga penjaminan (CNBC Indonesia, 2025), membentuk pendekatan manajerial yang berorientasi pada penyelesaian hambatan likuiditas secara cepat dan langsung (BRI Danareksa Sekuritas, 2025; The Conversation Indonesia, 2026).

Transisi dari Sri Mulyani Indrawati, figur yang identik dengan kehati-hatian fiskal (*fiscal prudence*) selama dua periode kepemimpinan (2005–2010 dan 2016–2025), kepada Purbaya membawa pergeseran paradigma menuju doktrin ekspansif pro-pertumbuhan. Purbaya menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi hingga 6–7% per tahun melalui penyuntikan likuiditas ke sektor riil (Antara News, 2025; The Straits Times, 2026). Hanum et al. (2025) menilai paradigma ini mendefinisikan ulang efisiensi anggaran sebagai realokasi produktif, bukan pemotongan pasif. Namun, pada pekan pertama pengangkatannya (8–15 September 2025), analisis jaringan sosial dan sentimen Twitter/X menunjukkan lonjakan skeptisisme dan dominasi nada negatif dalam percakapan warganet (Ginting, 2026).

Pergeseran substansi kebijakan tersebut berjalan beriringan dengan gaya komunikasi yang tidak lazim bagi pejabat tinggi sektor keuangan. Berbeda dengan pendahulunya yang berkomunikasi secara terstruktur, Purbaya kerap menjelaskan kebijakan secara spontan, terbuka, dan dengan bahasa sehari-hari di ruang publik (Humas Indonesia, 2026; PR Indonesia, 2026; UPI, 2025). Kajian kebahasaan menunjukkan bahwa tuturan Purbaya bercorak jujur, populis, dan asertif untuk meruntuhkan kekakuan birokrasi (Mutammimah, 2025; Salsabila et al., 2025; Wibowo, 2025), sementara pidato pertamanya membangun kebersamaan dan emosionalitas dengan jajaran birokrasi (Saputra et al., 2026). Di sisi lain, gaya yang sama berisiko menimbulkan salah tafsir di kalangan pelaku pasar, sebagaimana tercermin dari polarisasi sentimen di media sosial (Fauziah et al., 2026; Muntaza et al., 2025).

Ketegangan tersebut dapat dijelaskan melalui teori sinyal. Teori sinyal yang dirumuskan Spence (1973) dalam konteks pasar tenaga kerja dan kemudian diadaptasi ke ranah kebijakan makroekonomi (Blinder, 1998; Woodford, 2005) memandang setiap tindakan dan pernyataan resmi pejabat sebagai sinyal yang ditafsirkan pasar untuk mengurangi asimetri informasi. Pernyataan yang konsisten, terkoordinasi, dan didukung tindakan menghasilkan sinyal jernih (*clear signaling*), sedangkan pernyataan yang ambigu, berubah-ubah, atau bertentangan antarlembaga menghasilkan sinyal tidak jernih (*noisy signaling*) yang meningkatkan premi risiko. Dalam kerangka ini, kredibilitas kebijakan ditentukan oleh konsistensi antara pesan, tindakan, dan respons lembaga lain yang terkait.

Teori sinyal perlu dilengkapi dengan konsep paradoks transparansi. Bernstein (2012) menunjukkan bahwa keterbukaan penuh dalam organisasi tidak selalu menghasilkan kinerja dan kepercayaan yang lebih baik; visibilitas yang berlebihan justru dapat memicu kekhawatiran, perilaku defensif, dan kecurigaan. Jika dikaitkan dengan argumen Morris dan Shin (2002), keterbukaan tanpa filter (*unfiltered transparency*) dari pejabat fiskal dapat memperbanyak informasi publik tetapi sekaligus menurunkan presisinya. Kajian semantik dan netnografi terhadap akun media sosial Purbaya juga menunjukkan bahwa keterbukaan pejabat publik membutuhkan pengelolaan *personal branding* yang cermat agar tidak memperkeruh persepsi (Fauziah et al., 2026; Mutammimah, 2025).

Dimensi ketiga yang relevan adalah komunikasi kepemimpinan autentik. Avolio dan Gardner (2005) mendefinisikan kepemimpinan autentik sebagai kepemimpinan yang ditandai kejujuran, transparansi nilai, dan keberanian mengakui keterbatasan. Kepemimpinan semacam ini efektif membangun kepercayaan interpersonal dan legitimasi moral. Namun, dalam tata kelola fiskal yang melibatkan banyak lembaga, autentisitas individu dapat berbenturan dengan kebutuhan disiplin pesan kelembagaan (Canel & Luoma-aho, 2019). Ketiga kerangka tersebut, yaitu sinyal kebijakan, paradoks transparansi, dan kepemimpinan autentik, menjadi lensa analisis penelitian ini.

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v16i5.5203

Penelitian terdahulu tentang Purbaya cenderung terfragmentasi. Sebagian besar studi berfokus pada aspek kebahasaan, seperti semantik, pragmatik, retorika, dan gaya bahasa (Mutammimah, 2025; Salsabila et al., 2025; Saputra et al., 2026; Wibowo, 2025), atau pada sentimen dan citra di media sosial (Fauziah et al., 2026; Ginting, 2026; Muntaza et al., 2025). Studi lain menelaah substansi fiskal atau respons pasar secara terpisah (Hanum et al., 2025; Pratama & Setiawan, 2025), sedangkan kajian komunikasi reformasi perpajakan pada masa transisi pemerintahan belum mengaitkannya dengan kredibilitas pasar (Artanti et al., 2025). Belum ditemukan kajian yang mengintegrasikan substansi kebijakan fiskal, pola komunikasi publik, dan respons pasar maupun publik dalam satu kerangka teoretis sepanjang masa jabatan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi studi komunikasi pemerintahan (Canel & Luoma-aho, 2019) dengan ekonomi politik makro (Gulen & Ion, 2016; Woodford, 2005) untuk menjelaskan batas antara transparansi publik dan kredibilitas fiskal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis (1) pola komunikasi publik Purbaya Yudhi Sadewa pada isu-isu kebijakan fiskal utama selama masa jabatannya, (2) bagaimana pola tersebut membentuk sinyal kebijakan yang jernih atau tidak jernih bagi pasar dan publik, dan (3) implikasinya bagi kredibilitas kelembagaan fiskal. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan konsep paradoks transparansi dari ranah organisasi ke ranah komunikasi fiskal. Secara praktis, penelitian ini menawarkan rekomendasi bagi perumusan protokol komunikasi pejabat fiskal di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif-deskriptif (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018). Kasus yang dikaji adalah masa jabatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, yaitu 8 September 2025 hingga 14 September 2026. Desain studi kasus dipilih karena fenomena yang diteliti bersifat kontemporer, terikat pada konteks kelembagaan yang spesifik, dan batas antara fenomena dan konteksnya tidak dapat dipisahkan secara tegas (Yin, 2018). Unit analisis penelitian adalah peristiwa komunikasi kebijakan, yaitu pernyataan publik, siaran pers, dan respons kelembagaan yang berkaitan dengan isu kebijakan fiskal.

Data penelitian merupakan data sekunder yang dihimpun dalam korpus berjumlah 36 dokumen terverifikasi. Korpus terdiri atas 12 dokumen resmi pemerintah, KSSK, dan Kementerian Keuangan; 6 transkrip komunikasi publik, termasuk rapat dengar pendapat (RDP); serta 18 artikel berita dari media ekonomi, antara lain CNBC Indonesia, Bloomberg Technoz, Antara News, The Straits Times, dan The Conversation Indonesia. Dokumen dipilih secara purposif dengan kriteria (1) terbit dalam rentang masa jabatan atau segera setelahnya, (2) memuat pernyataan atau kebijakan Menteri Keuangan atau respons lembaga terkait, dan (3) berasal dari sumber resmi atau media arus utama yang dapat ditelusuri. Untuk triangulasi, korpus dibandingkan dengan hasil penelitian empiris terdahulu mengenai komunikasi dan kebijakan Purbaya (Fauziah et al., 2026; Ginting, 2026; Hanum et al., 2025; Muntaza et al., 2025; Mutammimah, 2025; Pratama & Setiawan, 2025; Salsabila et al., 2025; Saputra et al., 2026) serta satu buku referensi (Kurniawan, 2025).

Data dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif yang dipadukan dengan empat fungsi *framing* Entman (1993), yaitu pendefinisian masalah (*define problems*), diagnosis penyebab (*diagnose causes*), penilaian moral (*make moral judgments*), dan rekomendasi penyelesaian (*suggest remedies*). Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, dokumen dibaca berulang dan dipilah ke dalam lima isu kebijakan, yaitu konsolidasi awal, reformasi administrasi perpajakan, injeksi likuiditas SAL, hubungan kelembagaan, dan transisi jabatan. Kedua, setiap peristiwa komunikasi dikodekan berdasarkan fungsi *framing* Entman. Ketiga, kejernihan sinyal dinilai dengan indikator berupa ada tidaknya klarifikasi lanjutan dari lembaga lain, konsistensi antarpernyataan, dan respons pasar atau publik yang dilaporkan. Keempat, temuan setiap isu ditafsirkan menggunakan teori sinyal, paradoks transparansi, dan kepemimpinan autentik, lalu disintesis dalam matriks analisis.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan dokumen resmi, transkrip, dan pemberitaan untuk setiap peristiwa, serta triangulasi teori dengan menafsirkan temuan dari tiga kerangka teoretis (Yin, 2018). Urutan waktu setiap peristiwa diperiksa silang antarsumber untuk menghindari kesalahan kronologi. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara dan tidak menguji hubungan kausal antara komunikasi dan pergerakan pasar; temuan mengenai respons pasar dan sentimen publik bersumber dari penelitian terdahulu dan pemberitaan yang dirujuk.

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v16i5.5203

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap korpus menghasilkan lima isu kebijakan yang menjadi titik krusial komunikasi fiskal selama masa jabatan Purbaya, yaitu konsolidasi awal di tengah tuntutan publik, reformasi administrasi perpajakan, injeksi likuiditas SAL, hubungan kelembagaan, dan transisi jabatan. Kelima isu dibahas secara kronologis, kemudian disintesis dalam Tabel 1 untuk memperlihatkan pola sinyal yang muncul dan implikasinya bagi pasar dan publik.

Isu pertama muncul pada awal masa jabatan, ketika Purbaya menghadapi gelombang protes terkait gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Pernyataan awalnya yang menyebut protes tersebut berasal dari sebagian kecil rakyat memicu polemik. Purbaya kemudian menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, menyebut dirinya 'menteri kagetan', dan memohon dukungan publik (Antara News, 2025; Humas Indonesia, 2026). Pidato pertamanya di hadapan jajaran Kementerian Keuangan menonjolkan kebersamaan dan emosionalitas untuk merangkul birokrasi (Saputra et al., 2026), sementara akun TikTok-nya digunakan sebagai sarana pemulihan citra melalui *personal branding* yang humanis (Fauziah et al., 2026). Sentimen publik di Twitter/X pun bergeser dari dominasi nada negatif pada pekan pertama menuju pemulihan bertahap (Ginting, 2026).

Dari perspektif teori sinyal, pernyataan awal tersebut merupakan sinyal tidak jernih karena belum selaras dengan sensitivitas politik saat itu dan harus segera dikoreksi. Permohonan maaf terbuka dapat dibaca sebagai wujud kepemimpinan autentik (Avolio & Gardner, 2005), yaitu keberanian mengakui kekeliruan yang efektif meredam ketegangan politik jangka pendek. Dalam kerangka Entman (1993), permohonan maaf tersebut berfungsi membingkai ulang masalah dari 'protes yang tidak representatif' menjadi 'kesalahan komunikasi pejabat baru', sehingga beban moral beralih kepada diri komunikator. Namun, pola koreksi cepat ini juga menunjukkan bahwa autentisitas yang membangun legitimasi publik sekaligus menghadirkan biaya berupa ketidakpastian bagi pengamat pasar mengenai konsistensi pernyataan Menteri Keuangan.

Isu kedua berkaitan dengan reformasi administrasi perpajakan. Purbaya melakukan inspeksi mendadak ke layanan Kring Pajak dan merotasi sekitar 300 pejabat Direktorat Jenderal Pajak untuk mengikis budaya Asal Bapak Senang (ABS) (DDTC News, 2025; Pajakku, 2025). Analisis pragmatik menunjukkan bahwa tuturan Purbaya dalam isu ini didominasi tindak tutur asertif dan komisif yang menegaskan komitmen terhadap transparansi (Salsabila et al., 2025). Langkah tersebut sejalan dengan temuan Artanti et al. (2025) bahwa komunikasi reformasi perpajakan pada masa transisi pemerintahan merupakan sarana penting untuk membangun kepercayaan publik. Di sisi lain, pelaku usaha melalui Kadin dan Apindo menyampaikan kekhawatiran mengenai potensi keterlambatan restitusi pajak selama transisi sistem Coretax.

Temuan ini merupakan ilustrasi nyata paradoks transparansi. Membuka masalah internal birokrasi perpajakan ke ruang publik memberikan sinyal jernih mengenai komitmen reformasi dan meningkatkan legitimasi di mata masyarakat. Namun, visibilitas yang sama mengirim sinyal lain kepada wajib pajak korporasi, yaitu adanya gangguan operasional di tubuh otoritas pajak. Sebagaimana dijelaskan Bernstein (2012), keterbukaan yang tinggi dapat memicu respons defensif dari pihak yang diamati; dalam konteks ini, kekhawatiran pelaku usaha mengenai restitusi menunjukkan bagaimana transparansi atas proses internal dapat diterjemahkan menjadi ketidakpastian kebijakan yang berpotensi menahan keputusan bisnis (Gulen & Ion, 2016).

Isu ketiga, yang paling menonjol, adalah penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dimulai dari penyaluran tahap awal sebesar Rp200 triliun hingga pagu kumulatif maksimal Rp381 triliun (Antara News Jatim, 2026; CNBC Indonesia, 2026a; Infobanknews, 2026). Kebijakan ini diarahkan untuk menekan suku bunga kredit dan menggerakkan likuiditas perbankan (Kurniawan, 2025). Pratama dan Setiawan (2025) mencatat penguatan indeks saham sektor perbankan sebesar 2,4–3,1% yang kemudian dikenal sebagai '*Purbaya Effect*'. Analisis sentimen komentar YouTube menggunakan *Support Vector Machine* juga menunjukkan bahwa 56,3% komentar yang dianalisis bernada mendukung kebijakan tersebut (Muntaza et al., 2025). Meskipun demikian, kebijakan ini diiringi klarifikasi berulang, antara lain mengenai acuan bunga deposito valas 4% yang ditegaskan bukan merupakan arahan KSSK (CNN Indonesia, 2025; Investortrust.id, 2025).

Ketidakjernihan sinyal pada isu SAL tampak pula dari pemberitaan pada tanggal yang sama, 21 Juli 2026. Satu media memberitakan pernyataan Purbaya bahwa likuiditas perbankan lancar dan sinergi dengan Bank

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v16i5.5203

Indonesia berjalan baik (Bloomberg Technoz, 2026), sementara media lain memberitakan pengakuannya bahwa likuiditas kian ketat dengan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga beberapa bank yang negatif (CNBC Indonesia, 2026a). Terlepas dari perbedaan pembingkaian media, kedua laporan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan ekspansif disampaikan secara jernih, tetapi parameter dan dampaknya dikomunikasikan secara berubah-ubah. Kondisi ini sesuai dengan argumen Morris dan Shin (2002) bahwa informasi publik yang kurang presisi justru dapat memperbesar reaksi pasar, serta menegaskan pentingnya pengelolaan ekspektasi yang konsisten dalam kebijakan makro (Blinder et al., 2008; Woodford, 2005).

Isu keempat menyangkut hubungan kelembagaan. Wacana pemotongan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) bagi pemerintah daerah yang lambat menyerap anggaran memicu ketegangan dengan 18 gubernur. Estimasi awal setoran Danantara sebesar Rp120 triliun dan evaluasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga memerlukan penjelasan berulang dari Istana dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk menjaga keselarasan komunikasi antarlembaga. Pola ini menunjukkan sinyal tidak jernih pada tingkat antarlembaga: pernyataan individual seorang menteri dalam sistem fiskal yang melibatkan banyak aktor menimbulkan biaya koordinasi yang harus ditanggung lembaga lain. Canel dan Luoma-aho (2019) menekankan bahwa komunikasi sektor publik menuntut keselarasan pesan antarorganisasi, sedangkan Binder (2021) menunjukkan bahwa ketegangan terbuka antara aktor politik dan otoritas ekonomi dapat menurunkan kredibilitas kelembagaan di mata pasar.

Isu kelima adalah transisi jabatan. Pemberhentian Purbaya diumumkan pada 14 September 2026 di tengah rapat dengar pendapat dengan DPD RI, dan jabatannya digantikan oleh Suahasil Nazara (CNBC Indonesia, 2026b; Kementerian Keuangan RI, 2026; Media Justitia, 2026; TVRI, 2026). Pidato pamit yang sangat singkat meminimalkan ruang tafsir baru, sementara penegasan kontinuitas kebijakan oleh penggantinya mengembalikan fokus pada kehati-hatian fiskal (The Conversation Indonesia, 2026). Dalam kerangka teori sinyal, momen ini memperlihatkan pemulihan sinyal jernih melalui pengurangan volume komunikasi dan penegasan kesinambungan. Namun, data penelitian ini tidak memungkinkan penarikan kesimpulan kausal bahwa gaya komunikasi menjadi penyebab pemberhentian; perdebatan etika komunikasi kepemimpinan yang muncul setelahnya (PR Indonesia, 2026) lebih tepat dibaca sebagai refleksi publik atas peristiwa tersebut.

Tabel 1. Sintesis Analisis Kebijakan, Sinyal Komunikasi, dan Implikasi Pasar

Isu Kebijakan	Gaya dan Sinyal Komunikasi Publik	Analisis Teoretis	Dampak dan Implikasi bagi Pasar/Publik
Konsolidasi awal dan tuntutan 17+8	Pernyataan langsung yang memicu polemik, disusul permohonan maaf terbuka dan klaim 'menteri kagetan'	Kepemimpinan autentik; sinyal awal tidak jernih yang segera dikoreksi	Sentimen negatif awal di Twitter/X, kemudian pemulihan citra melalui TikTok (Fauziah et al., 2026; Ginting, 2026)
Reformasi administrasi perpajakan dan Coretax	Inspeksi mendadak Kring Pajak, penertiban budaya ABS, rotasi sekitar 300 pejabat pajak	Paradoks transparansi: legitimasi reformasi meningkat, tetapi muncul sinyal gangguan operasional	Apresiasi publik (Salsabila et al., 2025); kekhawatiran pelaku usaha terhadap keterlambatan restitusi
Injeksi likuiditas SAL (Rp200–381 triliun)	Penjelasan arah penurunan bunga kredit; klarifikasi acuan deposito valas 4%; pernyataan berbeda tentang kondisi likuiditas	Sinyal ekspansif jernih pada arah, tidak jernih pada parameter	Penguatan saham sektor perbankan 2,4–3,1% (Pratama & Setiawan, 2025); 56,3% komentar YouTube mendukung (Muntaza et al., 2025)
Pengelolaan TKD, Danantara, dan MBG	Wacana pemotongan TKD daerah yang lambat menyerap anggaran; estimasi setoran Danantara Rp120 triliun	Sinyal tidak jernih antarlembaga; biaya koordinasi	Ketegangan dengan 18 gubernur; klarifikasi Istana dan DEN
Pemberhentian dan transisi jabatan	Pemberhentian saat RDP DPD RI; pidato pamit sangat singkat	Komunikasi krisis; pemulihan sinyal melalui penegasan kesinambungan	Penegasan kontinuitas kebijakan oleh pengganti; perdebatan etika komunikasi kepemimpinan

Tabel 1 memperlihatkan pola yang konsisten pada kelima isu. Pada setiap isu, keterbukaan dan autentisitas Purbaya memberikan arah kebijakan yang jelas dan memperkuat legitimasi di mata publik, tetapi parameter kebijakan, waktu pelaksanaan, dan koordinasi antarlembaga dikomunikasikan secara kurang presisi sehingga memerlukan klarifikasi lanjutan. Dalam kerangka Entman (1993), Purbaya secara konsisten

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v16i5.5203

mendefinisikan masalah ekonomi sebagai kemacetan likuiditas dan kekakuan birokrasi, mendiagnosis penyebabnya pada budaya ABS dan dana pemerintah yang mengendap, memberikan penilaian moral yang berpihak pada kepentingan publik, dan menawarkan solusi berupa intervensi langsung. Pembingkaian tersebut efektif bagi audiens publik, tetapi kurang memadai bagi audiens pasar yang membutuhkan kepastian parameter.

Temuan tersebut mengarah pada proposisi bahwa komunikasi fiskal menghadapi dua audiens dengan kebutuhan sinyal yang berbeda. Publik menilai kredibilitas dari kejujuran dan kedekatan komunikator, sedangkan pasar menilainya dari konsistensi dan presisi pesan. Paradoks transparansi dalam komunikasi fiskal muncul ketika atribut yang membangun kepercayaan publik, seperti spontanitas, keterbukaan, dan pengakuan atas kekeliruan, justru menurunkan keterprediksian kebijakan di mata pasar. Proposisi ini memperluas temuan Bernstein (2012) yang semula berada pada konteks organisasi, serta melengkapi literatur komunikasi otoritas ekonomi yang selama ini lebih banyak berfokus pada bank sentral (Blinder et al., 2008; Geraats, 2002).

Secara praktis, temuan ini menunjukkan perlunya protokol komunikasi fiskal yang tidak mengorbankan keterbukaan, tetapi menata presisinya. Protokol tersebut dapat mencakup pemisahan saluran komunikasi naratif untuk publik dan saluran teknis yang memuat parameter kebijakan untuk pasar, koordinasi pesan lintas lembaga sebelum pengumuman kebijakan strategis, serta penggunaan siaran pers bersama KSSK untuk isu yang menyangkut stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, keberanian eksekusi kebijakan dapat diimbangi dengan konsistensi sinyal yang menjaga kredibilitas kelembagaan.

KESIMPULAN

Masa jabatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (2025–2026) memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif yang disertai komunikasi publik terbuka menghasilkan dua konsekuensi sekaligus. Keterbukaan, penertiban budaya ABS, dan injeksi likuiditas SAL memberikan arah kebijakan yang jelas dan memperkuat legitimasi publik. Namun, spontanitas pernyataan dan lemahnya koordinasi pesan antarlembaga menghasilkan sinyal kebijakan yang tidak jernih, yang tampak dari klarifikasi berulang oleh KSSK, Danantara, DEN, dan Istana serta dari pemberitaan yang saling bertentangan mengenai kondisi likuiditas perbankan. Secara teoretis, penelitian ini mengusulkan bahwa paradoks transparansi dalam komunikasi fiskal bersumber dari perbedaan kebutuhan sinyal antara audiens publik dan audiens pasar.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder, tidak melibatkan wawancara dengan pejabat maupun pelaku pasar, dan tidak menguji hubungan kausal antara peristiwa komunikasi dan pergerakan pasar. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan studi peristiwa (*event study*) terhadap harga aset dan imbal hasil surat berharga negara di sekitar pernyataan pejabat fiskal, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, serta perbandingan lintas periode kepemimpinan Kementerian Keuangan. Bagi pemerintah, temuan ini merekomendasikan penyusunan protokol komunikasi fiskal yang memadukan keterbukaan dengan disiplin pesan dan koordinasi antarlembaga.

DAFTAR PUSTAKA

Angelico, C., Marcucci, J., Miccoli, M., & Quarta, F. (2022). Can we measure inflation expectations using Twitter? *Journal of Econometrics, 228*(2), 259–277. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2021.12.007

Antara News. (2025, 9 September). *Menkeu Purbaya jelaskan ucapan yang tuai kontroversi publik*. https://www.antaranews.com/berita/5096717/menkeu-purbaya-jelaskan-ucapan-yang-tuai-kontroversi-publik

Antara News Jatim. (2026, 2 September). *Purbaya: SAL tak ganggu likuiditas bank, kredit bisa capai 20 persen*. https://jatim.antaranews.com/berita/1095241/purbaya-sal-tak-ganggu-likuiditas-bank-kredit-bisa-capai-20-persen

Artanti, N. P., Saleh, A. M., & Prasetyo, B. D. (2025). Pursuing public trust: Tax reform communication during the Indonesian government transition. *ETTISAL: Journal of Communication, 10*(2), 211–244. https://doi.org/10.21111/ettisal.v10i2.11204

Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership. *The Leadership Quarterly, 16*(3), 315–338.

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v16i5.5203

https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2005.03.001

Bernstein, E. S. (2012). The transparency paradox: A role for privacy in organizational learning and operational control. *Administrative Science Quarterly, 57*(2), 181–216. https://doi.org/10.1177/0001839212453028

Binder, C. (2021). Presidential antagonism and central bank credibility. *Economics & Politics, 33*(2), 244–263. https://doi.org/10.1111/ecpo.12173

Blinder, A. S. (1998). *Central banking in theory and practice*. MIT Press.

Blinder, A. S., Ehrmann, M., Fratzscher, M., De Haan, J., & Jansen, D. J. (2008). Central bank communication and monetary policy: A survey of theory and evidence. *Journal of Economic Literature, 46*(4), 910–945. https://doi.org/10.1257/jel.46.4.910

Bloomberg Technoz. (2026, 21 Juli). *Purbaya: Likuiditas perbankan lancar, sinergi dengan BI amat baik*. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/115768/purbaya-likuiditas-perbankan-lancar-sinergi-dengan-bi-amat-baik

BRI Danareksa Sekuritas. (2025, 10 September). *Pelantikan Menkeu Purbaya hadirkan perspektif baru atas tantangan ekonomi Indonesia*. https://www.bridanareksasekuritas.co.id/brids-pelantikan-menkeu-purbaya-hadirkan-perspektif-baru-atas-tantangan-ekonomi-indonesia

Canel, M. J., & Luoma-aho, V. (2019). *Public sector communication: Closing gaps between citizens and public organizations*. Wiley-Blackwell.

CNBC Indonesia. (2025, 16 Mei). *Bukti kesaktian LPS: Sukses kawal suku bunga pinjaman tak naik*. https://www.cnbcindonesia.com/market/20250516153205-17-633858/bukti-kesaktian-lps-sukses-kawal-suku-bunga-pinjaman-tak-naik

CNBC Indonesia. (2026a, 21 Juli). *Purbaya akui likuiditas kian ketat: Kredit & DPK beberapa bank negatif*. https://www.cnbcindonesia.com/market/20260721161307-17-752644/purbaya-akui-likuiditas-kian-ketat-kredit-dpk-beberapa-bank-negatif

CNBC Indonesia. (2026b, 14 September). *Media asing sorot Prabowo ganti Purbaya & tunjuk Suahasil jadi Menkeu*. https://www.cnbcindonesia.com/news/20260914170559-4-767811/media-asing-sorot-prabowo-ganti-purbaya-tunjuk-suahasil-jadi-menkeu

CNN Indonesia. (2025). *Menkeu Purbaya diprotes Hotman Paris soal bunga deposito turun* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=kPDNP9uxGeI

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

DDTC News. (2025, 8 September). *Profil lengkap Purbaya Yudhi Sadewa, Menkeu baru lulusan Elektro ITB*. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1813499/profil-lengkap-purbaya-yudhi-sadewa-menkeu-baru-lulusan-elektro-itb

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication, 43*(4), 51–58. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x

Fauziah, S. I., Mulyadi, M., Zahari, Z., Ali, M., & Andyna, C. (2026). Personal branding sebagai strategi pemulihan citra: Studi netnografi akun TikTok Purbaya Yudhi Sadewa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2*(3), 3651–3660. https://doi.org/10.63822/8jndn811

Geraats, P. M. (2002). Central bank transparency. *The Economic Journal, 112*(483), F532–F565. https://doi.org/10.1111/1468-0297.00083

Ginting, L. G. (2026). Sentimen publik terhadap kebijakan fiskal pada pengangkatan Menteri Keuangan Purbaya di Twitter/X. *Journal Economic and Strategy, 7*(1), 132–148. https://doi.org/10.36490/jes.v7i1.2581

Gulen, H., & Ion, M. (2016). Policy uncertainty and corporate investment. *The Review of Financial Studies,*

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v16i5.5203

29(3), 523–564. https://doi.org/10.1093/rfs/hhv050

Hanum, F., Yazid, M., Musfiqoh, S., & Bakhri, S. (2025). Relevansi prinsip efisiensi dan distribusi fiskal Abu Yusuf dalam kebijakan fiskal Indonesia: Analisis komparatif terhadap era Purbaya Yudhi Sadewa. *Moderasi: Journal of Islamic Studies, 5*(2). https://doi.org/10.54471/moderasi.v5i2.160

Humas Indonesia. (2026, 22 September). *Polemik etika di balik gaya komunikasi 'koboi' Menkeu Purbaya*. https://humasindonesia.id/berita/polemik-etika-di-balik-gaya-komunikasi-koboi-menkeu-purbaya-2935

Infobanknews. (2026, 3 September). *Purbaya pastikan penarikan SAL tak ganggu likuiditas perbankan*. https://infobanknews.com/purbaya-pastikan-penarikan-sal-tak-ganggu-likuiditas-perbankan

Investortrust.id. (2025, 26 September). *Menkeu Purbaya tegaskan suku bunga deposito valas 4% bukan arahan KSSK*. https://investortrust.id/financial/80283/menkeu-purbaya-tegaskan-suku-bunga-deposito-valas-4-bukan-arahan-kssk

Kementerian Keuangan RI. (2025). *Profil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa*. https://www.kemenkeu.go.id/profile/menteri/Purbaya-Yudhi-Sadewa

Kementerian Keuangan RI. (2026, 15 September). *Suahasil Nazara resmi jabat Menteri Keuangan gantikan Purbaya Yudhi Sadewa* [Siaran pers]. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Suahasil-Nazara-Resmi-Jabat-Menteri-Keuangan

Kurniawan, D. (2025). *Purbaya Yudhi Sadewa: Bagaimana Menkeu baru mengubah arah anggaran negara*. Penerbit Aksara Utama. https://books.google.co.id/books?id=xEWWEQAAQBAJ

Media Justitia. (2026, 15 September). *Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari jabatan Menteri Keuangan, Suahasil Nazara resmi menggantikan*. https://mediajustitia.com/berita/purbaya-yudhi-sadewa-dicopot-dari-jabatan-menteri-keuangan-suahasil-nazara-resmi-menggantikan

Morris, S., & Shin, H. S. (2002). Social value of public information. *American Economic Review, 92*(5), 1521–1534. https://doi.org/10.1257/000282802762024610

Muntaza, W. R., Kasih, P., & Saputra, M. A. (2025). Analisis sentimen terhadap kebijakan Purbaya Yudhi Sadewa menggunakan support vector machine. *INOTEK: Jurnal Inovasi Teknologi, 9*(1), 809–818. https://doi.org/10.29407/h5kbqg08

Mutammimah, N. I. (2025). Analisis semantik tuturan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam video TikTok. *Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra, 4*(6), 1567–1584. https://doi.org/10.55909/jpbs.v4i6.972

Pajakku. (2025, 9 September). *Profil Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan baru 2025–2029*. https://pajakku.com/artikel/profil-purbaya-yudhi-sadewa-menteri-keuangan-baru-2025-2029

PR Indonesia. (2026, 16 September). *Menyoal etika komunikasi kepemimpinan, berkaca pada pencopotan Purbaya*. https://prindonesia.co/detail/3821/Menyoal-Etika-Komunikasi-Kepemimpinan-Berkaca-Pada-Pencopotan-Purbaya

Pratama, A., & Setiawan, B. (2025). Analisis pengaruh kebijakan Menteri Keuangan Purbaya terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). *Economics, Business, Management, & Accounting Journal, 5*(2), 130–145.

Sadewa, P. Y. (2000). *The effect of exchange rate on foreign direct investment* [Disertasi doktoral, Purdue University]. Purdue e-Pubs. https://docs.lib.purdue.edu/dissertations/AAI3017862/

Salsabila, A. P., Sinaga, C. D., Lase, T. N., & Sinaga, C. F. H. (2025). Analisis tindak tutur dalam pidato Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa: Kajian pragmatik. *Jurnal Basataka, 8*(2), 1275–1288. https://doi.org/10.36277/basataka.v8i2.1071

Saputra, A., Sitinjak, D. R., & Nasution, A. A. (2026). Analisis retorika pada pidato pertama Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. *JIKA: Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan, 9*(1), 40–58. https://doi.org/10.31949/jika.v9i1.16769

Spence, M. (1973). Job market signaling. *The Quarterly Journal of Economics, 87*(3), 355–374.

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v16i5.5203

https://doi.org/10.2307/1882010

The Conversation Indonesia. (2026, 16 September). *Purbaya out, Suahasil Nazara in! Gonta-ganti menteri keuangan: Perekonomian tak membaik hanya karena sekadar ganti kepala* [Video]. Facebook. https://www.facebook.com/ConversationIDN/videos/purbaya-out-suahasil-nazara-in-gonta-ganti-menteri-keuangan-perekonomian-tak-mem/2266672430778082/

The Straits Times. (2026, 15 April). *Indonesia finance chief takes his growth bet to a world on edge*. https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-finance-chief-takes-his-growth-bet-to-a-world-on-edge

TVRI. (2026). *Serah terima jabatan Menteri Keuangan Republik Indonesia* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=406RNDgauvQ

UPI. (2025). *Diskursus komunikasi publik pejabat fiskal di Indonesia*. Universitas Pendidikan Indonesia. https://www.upi.edu/news/diskursus-komunikasi-publik-purbaya

Wibowo, R. (2025). Analisis gaya bahasa Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa dalam ruang publik pada tayangan YouTube. *Jurnal Versa, 3*(1), 112–128.

Woodford, M. (2005). Central bank communication and policy effectiveness. In *The Greenspan era: Lessons for the future* (pp. 399–474). Federal Reserve Bank of Kansas City.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.